

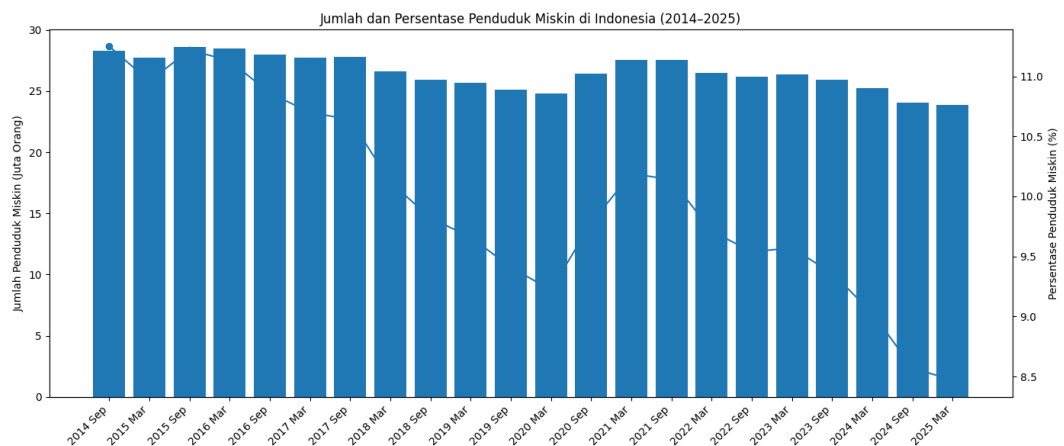
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan telah menjadi fenomena yang melekat dalam kehidupan negara-negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang tidak terkecuali, sebenarnya memiliki banyak potensi sumber daya alam untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan negara dan masyarakatnya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa keluar dari garis kemiskinan dan tidak bisa keluar dari kemiskinan. Hal ini membuat kemiskinan di Indonesia semakin rumit setiap tahunnya.

Gambar 1 Jumlah dan Presentase Miskin di Indonesia 2014-2025



Sumber : (Pusat Statistik, 2025)

Secara umum, pada periode Maret 2014–Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Tingkat kemiskinan tertinggi selama periode tersebut

tercatat pada Maret 2015, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 dan September 2022 terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan pada Maret dan September 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan yang mulai berangsur turun dari Maret 2021 hingga Maret 2025.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan kebijakan atau program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai. Bantuan Sosial Tunai dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang kepada masyarakat miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima (Amir, 2024)

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks sehingga suatu negara tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Secara umum kemiskinan dianggap sebagai suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerja yang mereka miliki untuk mendapatkan uang yang cukup untuk hidup.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah tidak meratanya distribusi pendapatan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Kesenjangan ini menyebabkan kelompok masyarakat miskin semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Pemerintah secara berkelanjutan telah mencanangkan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun, namun pada kenyataannya tingkat kemiskinan belum menunjukkan penurunan yang signifikan dan berkelanjutan.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara efektif, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam perencanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan tersebut mencakup peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu mandiri dan berkelanjutan. Kejelasan tujuan menjadi dasar utama dalam merumuskan strategi kebijakan publik yang tepat sasaran.

Menurut George R. (Terry, 2006), perencanaan merupakan fungsi dasar dalam manajemen yang dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan dilaksanakan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Perencanaan menjadi landasan utama bagi fungsi

manajemen lainnya karena keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun. Dalam konteks penelitian ini, perencanaan program pemberdayaan ekonomi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Namun demikian, perbedaan perspektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terkait definisi dan kriteria kemiskinan sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan pengarah yang jelas dari pemerintah, baik melalui regulasi, pedoman teknis, maupun koordinasi lintas sektor, agar program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan selaras dari tingkat pusat hingga desa. Pengarah ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program yang dijalankan memiliki arah yang sama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sebagai bentuk tindakan nyata, pemerintah menyelenggarakan berbagai program bantuan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pengembangan usaha mikro dan kecil. Tindakan pemerintah dalam bentuk implementasi program pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kemandirian

masyarakat miskin dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial (Edi, 2009:10).

Kemiskinan dalam konteks kebijakan publik di Indonesia tidak hanya dipahami 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan (BPS, 2024).

Pada tahun 2024, Garis Kemiskinan nasional tercatat berada pada kisaran Rp550.000–Rp580.000 per kapita per bulan. Berdasarkan standar tersebut, kemiskinan dikategorikan menjadi penduduk miskin, penduduk hampir miskin atau rentan miskin, serta penduduk sangat miskin yang tingkat pengeluarannya jauh di bawah garis kemiskinan. Selain itu, secara konseptual kemiskinan juga diklasifikasikan ke dalam kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural (Todaro & Smith, 2015; Huraerah, 2013). Beragamnya definisi dan kategori kemiskinan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran melalui perencanaan program pemberdayaan ekonomi yang terarah, sejalan dengan teori strategi pemerintah menurut

Geoff Mulgan yang menekankan pada kejelasan tujuan, pengarahan kebijakan, serta tindakan nyata dalam implementasi program (Mulgan dalam Sondang, 2008).

Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan salah satu daerah yang memiliki tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan. Meski dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, Bojonegoro masih memiliki kemiskinan yang cukup tinggi, pertama di kalangan masyarakat desa yang tidak terpampang langsung dengan manfaat ekonomi dari industri migas . Di tengah kondisi ini, pemerintahan daerah Bojonegoro telah meluncurkan bermacam program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal, yang dimana mereka memanfaatkan sumber daya alam dan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan bagi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Sholikin, 2024).

Tabel 1 Damisda Semester II Tahun 2025

No.	Kecamatan	DAMISDA Semester II 2024 (Jiwa)	DAMISDA Semester II 2024 (KK)
1	Kedungadem	13.235	5.033
2	Ngasem	11.804	4.570
3	Tambakrejo	11.363	4.056
4	Ngraho	7.005	2.345
5	Sumberrejo	6.134	2.346
6	Sukosewu	5.987	2.250
7	Kepohbaru	5.912	2.051
8	Dander	5.819	2.217
9	Kanor	5.727	2.136
10	Sekar	5.644	2.127
TOTAL		78.630	29.131

Sumber: Dinas Sosial

Berdasarkan rekap data DAMISDA Semester II Tahun 2024, Kecamatan Kedungadem, Ngasem, dan Tambakrejo menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Bojonegoro, masing-masing mencapai 13.235 jiwa, 11.804 jiwa, dan 11.363 jiwa. Selain itu, Kecamatan Ngraho dan Sumberrejo juga termasuk dalam lima besar wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 7.005 jiwa dan 6.134 jiwa. Tingginya jumlah penduduk miskin pada kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, seperti keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, serta kerentanan terhadap kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kecamatan-kecamatan tersebut perlu menjadi prioritas dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan penyaluran bantuan sosial agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata.

Gambar 2 Jumlah Penduduk Miskin Bojonegoro



Sumber : (BPS Bojonegoro, 2025)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro selama periode 2003–2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 28,12% pada tahun 2003 menjadi 11,49% pada tahun 2025, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 144,90 ribu jiwa pada tahun 2025 (Statistik, 2024).

Penurunan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meskipun sempat mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021, tren penurunan kembali berlanjut pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai tingkat terendah pada tahun 2025. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro telah memberikan dampak yang positif, meskipun masih diperlukan kebijakan yang berkelanjutan agar penurunan angka kemiskinan dapat terus dipertahankan. (Bojonegoro, 2024).

Provinsi Jawa Timur mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi ketiga bila dibandingkan dengan Pulau Jawa Seperti DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten. Hal ini menunjukan ketimpangan pertumbuhan pada ekonomi pada semua kelas sosial dimana pertumbuhan ekonomi hanya dapat dirasakan oleh kelompok kecil masyarakat.

Di Kabupaten Bojonegoro sendiri kemiskinan masih menjadi salah satu problem utama bagi pemerintah. Tercata di Badan Pusat Statistik (BPS) kalau tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakan tinggi bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Meningkatnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh : 1) Sulitnya Mendapatkan Pekerjaan, 2) Rendahnya Penghasilan, 3) Hilangnya Pekerjaan dan 4) Bantuan yang tidak sesuai. Untuk menurunkan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya seperti: 1). Memberikan berbagai bansos, 2) meningkatkan pendapatan masyarakat dan 4) melaksanakan program sarana infrastruktur.

Salah satu strategi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menekan angka kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan keterampilan wirausaha. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan kelompok rentan agar memiliki kemampuan berwirausaha sehingga mampu menciptakan sumber pendapatan secara mandiri. Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, program keterampilan wirausaha lebih menekankan pada peningkatan kemampuan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Dalam proses perencanaannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro memiliki peran sebagai koordinator pembangunan daerah yang menyusun arah kebijakan, menetapkan prioritas program, serta menyinergikan pelaksanaan program

lintas perangkat daerah. Melalui proses perencanaan tersebut, Bappeda berupaya memastikan bahwa program pemberdayaan keterampilan wirausaha disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta tujuan pembangunan daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

Meskipun program pemberdayaan keterampilan wirausaha telah menjadi salah satu alternatif dalam upaya pengentasan kemiskinan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian jenis pelatihan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan pendampingan setelah pelatihan, rendahnya akses terhadap modal usaha, dan belum optimalnya pemasaran hasil usaha peserta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi perencanaan program perlu dikaji secara lebih mendalam agar pelaksanaan program benar-benar mampu meningkatkan kemampuan berwirausaha masyarakat serta mendukung penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Kemiskinan merupakan masalah yang sering dialami oleh Negara maju ataupun Negara berkembang. Hanya saja tingkat kemiskinan penduduk di Negara berkembang lebih tinggi dari pada di Negara maju. (Hakim & Syaputra, 2020). Kemiskinan juga merupakan tantangan sosial yang kompleks di seluruh dunia, termasuk di banyak Negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim (Mohammad, Haikal, 2023).

Kemiskinan adalah salah satu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata di suatu daerah (Ana Kumalasari, 2024). Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan dalam peningkatan produktivitas (Huraerah, 2013).

Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang dan papan. Kemampuan pendapatan yang rendah juga akan berdampak kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia ini, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan (Ana Kumalasari, 2024).

Kemiskinan ialah salah satu problem kompleks yang dihadapi oleh negeri ini. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi, sedikitnya lapangan pekerjaan, dan tidak meratanya pembangunan yang dibuat oleh pemerintahan pusat. Oleh karena itu pemberdayaan menjadi salah satu yang sang penting bagi dilakukan agar masyarakat rentan dapat mengembangkan potensi diri merreka dengan baik, hingga kesejahteraan akan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Nada & Kartika Sari, 2021). Kemiskinan muncul bersamaan dengan kehadiran manusia dan merupakan

salah satu masalah paling mendasar dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dewasa ini, berbarengan dengan berkembangnya ilmu-ilmu sosial (Fahmi, 2024). Kemiskinan sampai hari ini masih menjadi persoalan sosial klasik yang selalu muncul dan dialami oleh setiap wilayah (H. Setiawan & Choirunnisa, 2023). Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya kemiskinan itu sendiri (Priseptian & Primandhana, 2022).

Dalam konteks strategi pengentasan kemiskinan, penting untuk memperhatikan bahwa setiap negara memiliki tantangan dan karakteristik unik yang memengaruhi upaya mereka dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif haruslah disesuaikan dengan kondisi lokal dan mempertimbangkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Misalnya, di negara-negara berkembang, di mana kemiskinan sering kali terkonsentrasi di daerah pedesaan dan di antara kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, strategi pengentasan kemiskinan perlu fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, dan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Di sisi lain, di negara-negara maju, di mana tantangan yang dihadapi mungkin lebih terkait dengan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan (Sahara, 2023)

Perlu adanya upaya dalam pengurangan angka tingkat kemiskinan, salah satunya dapat diatasi dengan cara menciptakan aktivitas ekonomi pada daerah-daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain secara konseptual menjelaskan bahwa secara konseptual faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (tingkat pendidikan dan keterampilan rendah), rendahnya motivasi, persepsi hubungan keluarga (persepsi orang tua sebagai beban), terbatasnya pilihan lapangan kerja yang sesuai (upah rendah dan banyak pekerjaan). jam kerja), dan tidak ada kreativitas (Adawiyah, 2020). Selanjutnya secara konseptual, faktor yang keluar dari kemiskinan adalah investasi atau tabungan, kesalehan (tidak putus asa, harapan untuk perubahan), jaringan, dan dukungan pemerintah dan swasta (Kurniyanto et al., 2023).

Bentuk-bentuk kemiskinan juga menjadi faktor penyebab kemiskinan seperti kemiskinan natural, kemiskinan natural dan kemiskian struktural. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin, kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Kemiskinan natural disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti karena cacat, sakit, lanjut usia atau karena bencana alam. Kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup

dan budaya dimana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kurang, sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Munculnya fenomena ini berdampak pada persepsi masyarakat terhadap pemerintah yang tidak mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya (Manzila Armylia, 2021).

Banyak faktor penyebab kemiskinan diantaranya: cacat fisik (mengalami kecacatan baik sejak lahir maupun karena kecelakaan), rendahnya pendidikan, tidak mempunyai keahlian atau keterampilan, tidak memiliki modal untuk berwirausaha, tidak tersedianya lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), hidup di lokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan infrastruktur terbatas. Penyebab kemiskinan di Indonesia karena sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan (Gayatri et al., 2022).

Pemerintah sebagai pelaksana amanat kedaulatan rakyat tentu memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari prinsip negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Salah satu implementasinya adalah tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Dalam upaya mengatasi kemiskinan tersebut Pemerintah telah merumuskan, menetapkan dan mengimplementasikan berbagai program. Misalnya, program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Inpres ini, yaitu Inpres No. 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Pengentasan Kemiskinan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan masalah kemiskinan secara berkelanjutan di desa desa miskin. Pada saat terjadinya krisis ekonomi yang kemudian berlanjut menjadi krisis multidimensional, juga telah diluncurkan program pengentasan kemiskinan, yaitu Program Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) yang kemudian dilanjutkan dengan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) (Sholikin, 2024).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini Yaitu: Bagaimana Strategi Pemerintah Dalam Perencanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusalah masalah di atas diatas maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Dalam

Perencanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro?

a. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan Strategi Pemerintah Dalam Perencanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

(1) Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai Strategi Pemerintah Dalam Perencanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Untuk Pengentasan Kemiskinan

(2) Manfaat Bagi BAPPEDA dan Dinas Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam menyusun serta menyempurnakan perencanaan program pemberdayaan ekonomi agar lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu menjawab permasalahan kemiskinan secara efektif.

(3) Manfaat Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah referensi akademik serta memperkaya kajian ilmiah mengenai Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan, khususnya dalam konteks kebijakan dan Perencanaan Pembangunan daerah.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dan urgensi penelitian dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep strategi, strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan (tujuan, pengarahan, dan tindakan), konsep kebijakan publik, kemiskinan, jenis-jenis kemiskinan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pada bab ini juga disajikan kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, informan dan teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, sumber dan manajemen data, serta teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif berbantuan NVivo.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan indikator strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan, yaitu tujuan,

pengarahan, dan tindakan dalam perencanaan program pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Pada bagian ini juga dibahas faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun pihak terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas strategi perencanaan program pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan.